

**RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (RLPPD)
KABUPATEN CILACAP TAHUN 2023**

A. CAPAIAN KINERJA MAKRO

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan.

Capaian kinerja makro yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Cilacap pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian kinerja tahun 2022	Capaian kinerja tahun 2023	Laju kinerja
1	Indeks Pembangunan Manusia	71,22	72,04	0,82
2	Angka Kemiskinan	11,02	10,99	-0,03
3	Angka Pengangguran	9,62	8,74	-0,88
4	Pertumbuhan Ekonomi	5,15	5,34	0,19
5	Pendapatan per Kapita (dalam juta rupiah)	60,88	65,95	5,07
6	Ketimpangan Pendapatan	0,356	0,364	0,008

Sumber data : BPS Kabupaten Cilacap

B. RINGKASAN CAPAIAN KINERJA URUSAN PELAYANAN DASAR

Capaian kinerja urusan pemerintahan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar yang meliputi urusan Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman, Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat, dan urusan Sosial.

Capaian kinerja urusan tersebut sebagai berikut :

1. Urusan Pendidikan

a. Capaian kinerja outcome

Capaian kinerja urusan pendidikan yang diperoleh oleh Kabupaten Cilacap pada tahun 2023 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Hasil	Capaian Kinerja Tahun 2022	Capaian Kinerja Tahun 2023
1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	77,89	78,74

No	Indikator Kinerja Hasil	Capaian Kinerja Tahun 2022	Capaian Kinerja Tahun 2023
3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	94,83	100
4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100	100
5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	99,44	100
6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	97,92	100
7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	100
8	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	98,95	100
9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	97,55	99,82
10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	96,84	96,41
11	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	97,24	100
12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100	100
13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	95,99	100
14	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	94,72	100

b. Realisasi Belanja Urusan Kesehatan

Anggaran belanja Urusan Kesehatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap sebesar Rp739.535.695.162,- terealisasi sebesar Rp693.848.197.868,- (93.82 %) dengan program/kegiatan unggulan yang telah dilaksanakan antara lain Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat dengan kegiatan Penyediaan Fasilitas

Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

c. Permasalahan yang Dihadapi.

Permasalahan dalam pelaksanaan Urusan Kesehatan yang dihadapi oleh Dinas Kesehatan adalah :

- 1) Akses dan mutu pelayanan kesehatan terutama pada pelayanan kesehatan dasar masih menjadi permasalahan. Hal ini antara lain berkaitan dengan jumlah dan jenis tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan dasar yang sudah teregistrasi masih belum terpenuhi pada beberapa puskesmas, yang tentunya akan berimplikasi pada mutu pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat. Hal lain berkaitan dengan akses pelayanan yaitu tingkat pemanfaatan fasilitas pelayanan kesehatan oleh masyarakat belum maksimal. Ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan yang sudah merata di wilayah Kabupaten Cilacap baru dimanfaatkan untuk orang yang sakit untuk mendapatkan pelayanan kuratif dan rehabilitatif (pelayanan pengobatan). Masyarakat yang sehat belum memanfaatkan untuk mendapatkan pelayanan promotif dan preventif, misalnya untuk mendapatkan informasi dan edukasi kesehatan, serta skrining kesehatan.
- 2) Perlindungan atas biaya pelayanan kesehatan juga masih merupakan permasalahan, dimana masih ada masyarakat yang belum menjadi peserta program jaminan kesehatan baik pemerintah maupun swasta. Hal ini diindikasikan dari masih rendahnya tingkat cakupan kepesertaan program JKN melalui BPJS (86,97%). Masyarakat yang tidak menjadi peserta program jaminan perlindungan sosial kesehatan, akan mendapatkan kesulitan pembiayaan ketika membutuhkan pelayanan kesehatan tingkat lanjut di RS (rujukan spesialis dan sub spesialis) yang pada umumnya merupakan penyakit dengan kategori katastrofis.
- 3) Partisipasi dan kontribusi masyarakat dalam pembangunan bidang kesehatan belum maksimal. Hal ini dapat diindikasikan dari masih rendahnya beberapa aktifitas yang berkaitan dengan peran serta masyarakat, seperti Survei Mawas Diri dan Musyawarah Masyarakat Desa (SMD dan MMD), desa/kelurahan dengan menerapkan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM), penanganan Orang dengan HIV (ODHIV), pencapaian Indeks Keluarga Sehat (IKS), praktik dan penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), dan akses pemanfaatan terhadap pelayanan kesehatan dasar.

Upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut :

- 1) Melakukan analisis jabatan untuk menyusun rencana kebutuhan dan formasi tenaga kesehatan pada tiap-tiap puskesmas, serta menyampaikan usulan kebutuhan tenaga kesehatan untuk mendapatkan tenaga Kesehatan yang dibutuhkan melalui rekrutmen PNS dan/atau PPPK.
- 2) Meningkatkan cakupan kepesertaan BPJS Kesehatan melalui pembayaran iuran premi BPJS Kesehatan dan bantuan iuran premi BPJS Kesehatan bagi Pekerja Bukan Penerima Upah (PBBU) dan Bukan Pekerja (BP) untuk mendapatkan perlindungan pelayanan kesehatan Kelas III.

- 3) Meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui metode Komunikasi Informasi dan Edukasi, serta membangun kemitraan dengan tokoh masyarakat untuk bersama-sama membudayakan gerakan hidup bersih dan sehat serta berkontribusi dalam menyelesaikan permasalahan kesehatan yang ada.

3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

a. Capaian Kinerja Outcome

Capaian kinerja urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang diperoleh oleh Kabupaten Cilacap pada tahun 2023 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Hasil	Capaian Kinerja Tahun 2022	Capaian Kinerja Tahun 2023
1	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	100	100
2	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota	100	100
3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	76,75	79,74
4	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	86,75	91,23
5	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	91,24	91,85
6	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	100	100
7	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	78,35	79,30
8	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	100	21,75
9	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	100	100

- b. Realisasi Belanja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 Anggaran belanja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air sebesar Rp236.101.702.268,- terealisasi sebesar Rp 227.092.114.539,- (96.18 %) dengan program/kegiatan unggulan yang telah dilaksanakan antara lain Program Penataan Bangunan Gedung kegiatan Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG, Program Penyelenggaraan Jalan kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota, Program Pengembangan Jasa Konstruksi kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi, Program Pengelolaan Sumber Daya Air kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) daerah, Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing, Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing, Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan, Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan
- c. Permasalahan yang Dihadapi
 Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah terkait dengan keterbatasan sumber daya baik berupa anggaran, personil maupun sarana dan prasarana. Untuk mengatasi hal tersebut dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada.

4. Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman

a. Capaian Kinerja Outcome

Capaian kinerja urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang diperoleh oleh Kabupaten Cilacap pada tahun 2023 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Hasil	Capaian Kinerja Tahun 2022	Capaian Kinerja Tahun 2023
1	Hunian untuk Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	100	100
2	Fasilitasi hunian penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	100	100
3	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	54,30	57,63
4	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	16,51	15,90

No	Indikator Kinerja Hasil	Capaian Kinerja Tahun 2022	Capaian Kinerja Tahun 2023
5	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	64,29	80,36

b. Realisasi Belanja Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Anggaran belanja Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Cilacap sebesar Rp71.793.069.399,- terealisasi sebesar Rp69.394.757.312,- (96.66 %) dengan program/kegiatan unggulan yang telah dilaksanakan antara lain Program Pengembangan Perumahan kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota, Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota, Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota, Program Kawasan Permukiman kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha, Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan.

c. Permasalahan yang Dihadapi

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman antara lain terkait dengan keterbatasan sumber daya dalam pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada dan juga dengan melibatkan peran serta perusahaan-perusahaan untuk mendukung pembiayaan pemenuhan layanan SPM melalui CSR.

5. Urusan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat

a. Capaian Kinerja Outcome

Capaian kinerja urusan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat yang diperoleh oleh Kabupaten Cilacap pada tahun 2023 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Hasil	Capaian Kinerja Tahun 2022	Capaian Kinerja Tahun 2023
1	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100	99,03
2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	94,44	94,44
3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100	100

No	Indikator Kinerja Hasil	Capaian Kinerja Tahun 2022	Capaian Kinerja Tahun 2023
4	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100	100
5	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100	100
6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	81,16	80,26
7	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	9	16,3

- b. Realisasi Belanja Urusan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat
 Anggaran belanja Urusan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cilacap sebesar Rp26.999.222.608,- terealisasi sebesar Rp25.716.087.125,- (95.25 %) dengan program/kegiatan unggulan yang telah dilaksanakan antara lain Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota, kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati / Walikota, Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten / Kota, Program Penanggulangan Bencana kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota, Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana), Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana.
- c. Permasalahan yang Dihadapi
 Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat antara lain :
- 1) Keterbatasan personil Satuan Polisi Pamong Praja dan BPBD tidak sebanding dengan Luasnya wilayah, jumlah penduduk dan potensi bencana di wilayah Kabupaten Cilacap.
 - 2) Masih rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap ketentuan Peraturan Daerah yang mengakibatkan tingginya tingkat pelanggaran Peraturan Daerah di wilayah Kabupaten Cilacap
 - 3) Pemadaman kebakaran dan penyelamatan belum optimal tertangani sesuai response time di beberapa Wilayah Manajemen Kebakaran
 - 4) Pemadaman kebakaran masih menimbulkan kerugian material yang relatif besar.

- 5) Pos Sektor Pemadam Kebakaran di 24 (dua puluh empat) kecamatan perlu dibangun secara permanen dan mandiri agar mempercepat layanan penanggulangan kebakaran
- 6) Ketersediaan pasokan/suply air darurat kebakaran melalui jaringan fire hydrant Pemadaman kebakaran masih sangat terbatas.
- 7) Terbatasnya Sumber daya petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan belum memenuhi standar minimal 1 (satu) unit kendaraan oleh 18 (delapan belas) petugas pemadam kebakaran
- 8) Kondisi dan usia kendaraan yang tersedia relatif memerlukan biaya perawatan yang tinggi

Untuk mengatasi permasalahan tersebut telah dilakukan upaya-upaya :

- 1) Mengintensifkan pemberdayaan Satpol PP Kecamatan dalam pelaksanaan tugas Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di wilayah Kecamatan, serta pengusulan penambahan personil Polisi Pamong Praja Kabupaten Cilacap. Sedangkan keterbatasan personil penanggulangan bencana diupayakan melalui Pembentukan Desa Tangguh Bencana untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam penanggulangan bencana.
- 2) Pelaksanaan kegiatan penegakan Perda melalui Sosialisasi dan pembinaan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dengan mengedepankan upaya preventif terhadap masyarakat.
- 3) Penambahan unit Pos Pemadam Kebakaran sesuai jumlah Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) dari 4 unit pos menjadi 24 Pos Sektor Pemadaman Kebakaran.
- 4) Tersedianya standar minimal armada kebakaran disetiap Pos Pemadam Kebakaran sebanyak 2 unit terdiri dari truk pemadam kebakaran dan mobil tangki air/water suply air damkar.
- 5) Terbangunnya Pos Sektor Kroya dan pengalihan fungsi gedung eks UPT BPBD Sidareja menjadi Pos Sektor Pemadam Kebakaran Sidareja.
- 6) Tersedianya pasokan air pemadam kebakaran melalui penambahan hydran mandiri di Pos Sektor Damkar Kroya dan penyusunan Detail Engineering Drawing (DED) Jaringan hidran kota dan lingkungannya di Kabupaten Cilacap.
- 7) Rekrutmen tenaga Relawan Pemadam Kebakaran (REDKAR) di setiap RW wilayah Kabupaten Cilacap.
- 8) Ketersediaan anggaran pemeliharaan pompa pemadam kebakaran (Power Take Off/PTO) dan rekondisi armada pemadam kebakaran sebanyak 2 (dua unit)

6. Urusan Sosial

a. Capaian Kinerja Outcome

Capaian kinerja urusan Sosial yang diperoleh oleh Kabupaten Cilacap pada tahun 2023 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Hasil	Capaian Kinerja Tahun 2022	Capaian Kinerja Tahun 2023
1	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	100	100
2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	100	100

b. Realisasi Belanja Urusan Sosial

Anggaran belanja Urusan Sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Cilacap sebesar Rp8.675.787.602,- terealisasi sebesar Rp 8.245.804.591,- (95.04) dengan program/kegiatan unggulan yang telah dilaksanakan antara lain Program Rehabilitasi Sosial kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial, Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV / AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial, Program Penanganan Bencana Kegiatan Perlindungan Sosial korban bencana alam dan sosial kabupaten / Kota.

c. Permasalahan yang Dihadapi

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan Sosial antara lain:

- 1) Belum optimalnya pendataan PPKS.
- 2) Terbatasnya SDM yang dimiliki.
- 3) Belum tersedianya shelter atau Rumah Singgah agar menampung pelayanan dasar bidang sosial di luar Panti.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut telah dilakukan :

- 1) Melakukan verval data PMKS/PPKS setiap tahun disertai penguatan koordinasi dengan pihak desa / kelurahan.
- 2) Koordinasi dengan OPD terkait untuk pemenuhan SDM sesuai kebutuhan.
- 3) Mengusulkan Anggaran baik APBD maupun APBD Propinsi melalui Bankeu.

C. HASIL EPPD DAN OPINI ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN SEBELUMNYA

1. Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) Kabupaten Cilacap sebagai berikut :

No	Tahun	Nilai	Status	Dasar
1	2023	3,1844	Sedang	Kepmendagri No. 100.2.1.7-6646 Tahun 2023
2	2022	2,60	Rendah	Kepmendagri No. 100.2.1.3-1109 Tahun 2023

2. Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Sebelumnya
Pemerintah Kabupaten Cilacap telah memperoleh opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebanyak 7 (tujuh) kali berturut-turut sejak tahun 2016 sampai dengan 2022.
Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2022 berdasarkan LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap Nomor : 53/LHP/XVIII.SMG/05/2023 tanggal 11 Mei 2023
Opini WTP berarti bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

D. RINGKASAN REALISASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN ANGGARAN DAERAH

Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap (Unaudited) Tahun 2023 Realisasi Pendapatan Daerah sebesar Rp3.476.262.675.652,55 atau tercapai 99,20% dari target yang ditetapkan. Sedangkan Belanja Daerah terealisasi sebesar Rp3.500.855.821.328,00 atau 95,41% dari alokasi anggaran yang telah ditetapkan.

Secara rinci realisasi anggaran pendapatan Pemerintah Kabupaten Cilacap Tahun 2023 berdasarkan jenis pendapatan sebagai berikut :

Jenis Pendapatan	Alokasi / Target	Realisasi	%
PENDAPATAN DAERAH	3.504.323.544.538,00	3.476.262.675.652,55	99,20
PENDAPATAN ASLI DAERAH	747.550.514.563,00	768.640.705.768,55	102,82
Pajak Daerah	292.600.000.000,00	296.270.228.744,00	101,25
Retribusi Daerah	23.220.715.990,00	19.684.990.112,00	84,77
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	60.134.845.365,00	61.133.781.992,00	101,66
Lain-lain PAD yang sah	371.594.953.208,00	391.551.704.920,55	105,37
PENDAPATAN TRANSFER	2.733.147.398.975,00	2.684.312.641.684,00	98,21
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.428.518.398.975,00	2.404.202.119.337,00	99,00

Pendapatan Transfer Antar Daerah	304.629.000.000,00	280.110.522.347,00	91,95
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	23.625.631.000,00	23.309.328.200,00	98,66
Pendapatan Hibah	23.625.631.000,00	23.309.328.200,00	98,66

Sedangkan untuk realisasi belanja daerah secara rinci sebagai berikut :

Jenis Belanja	Alokasi / Target	Realisasi	%
BELANJA DAERAH	3.669.162.818.636,54	3.500.855.821.328,00	95,41
BELANJA OPERASI	2.568.495.704.373,54	2.443.119.777.401,00	95,12
Belanja Pegawai	1.428.144.370.899,54	1.347.024.602.981,00	94,32
Belanja Barang dan Jasa	987.874.248.674,00	946.078.971.742,00	95,77
Belanja Subsidi	370.902.000,00	370.902.000,00	100,00
Belanja Hibah	150.923.682.800,00	148.484.800.678,00	98,38
Belanja Bantuan Sosial	1.182.500.000,00	1.160.500.000,00	98,14
BELANJA MODAL	509.353.233.063,00	468.852.514.719,00	92,05
Belanja Modal Tanah	1.231.499.750,00	908.341.510,00	73,76
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	139.786.293.583,00	123.847.686.038,00	88,60
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	172.108.873.000,00	156.897.597.697,00	91,16
Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	183.363.343.410,00	175.239.473.869,00	95,57
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	12.432.561.320,00	11.534.095.105,00	92,77
Belanja Modal Aset Lainnya	430.662.000,00	425.320.500,00	98,76
BELANJA TIDAK TERDUGA	1.310.380.000,00	279.100.208,00	21,30
Belanja Tidak Terduga	1.310.380.000,00	279.100.208,00	21,30
BELANJA TRANSFER	590.003.501.200,00	588.604.429.000,00	99,76
Belanja Bagi Hasil	29.888.070.200,00	29.206.572.700,00	97,72
Belanja Bantuan Keuangan	560.115.431.000,00	559.397.856.300,00	99,87

E. INOVASI DAERAH

Daftar Inovasi Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2023

No	Inovasi	Deskripsi	Instansi
1	Layar Surenko Mawa Rantatis (Pelayanan Penerbitan Surat Ijin Rekomendasi Penelitian Bagi Mahasiswa Yang	Adalah inovasi pelayanan berupa penerbitan surat ijin rekomendasi penelitian kepada masyarakat dengan menggunakan Aplikasi e-litbang, dengan adanya inovasi ini masyarakat	Baksebangpol

No	Inovasi	Deskripsi	Instansi
	Ramah Berkualitas dan Gratis)	dapat dengan mudah mengakses aplikasi dan menyingkat waktu untuk pengajuan surat ijin rekomendasi penelitian yang semula harus datang ke kantor kesbangpol. Sehingga dengan adanya inovasi ini diharapkan memiliki kebermanfaatan bagi masyarakat, diantaranya dapat diakses dimanapun dan kapanpun, memudahkan komunikasi dua arah tanpa harus bertatap muka langsung, meminimalisir penularan Covid-19 dan mempercepat serta mempermudah pelayanan.	
2	GAGIYAN METU (Tiga Strategi Pelayanan Melalui Satu Langkah) PAKET 3 In 1	Pelayanan yang memberikan kemudahan kepada pemohon dimana satu permohonan misal untuk akte kelahiran tetapi juga mendapatkan Kartu Keluarga untuk penambahan anggota keluarga dan Kartu identitas Anak/KIA untuk yang dibuatkan akte kelahiran. Paket Tree in One Kelahiran (Akte Kelahiran, KK dan KIA). Paket Tree In One Perkawinan (KK, KTP dan Surat nikah yang terintegrasi dengan Dukcapil).	Disdukcapil
3	Pelayanan Literasi Tuna Netra (PELITA)	Merupakan layanan peminjaman buku Braille kepada penyandang Tuna Netra anggota Perpustakaan, dengan cara datang langsung ke pertemuan rutin PERTUNI (Persatuan Tuna Netra Indonesia) Kabupaten Cilacap dan datang langsung ke rumah-rumah penyandang Tuna Netra, serta layanan belajar membaca buku braille bagi penyandang Tuna Netra yang belum bisa membaca buku braille	Dinas ARPUS
4	RISDA (Ruang Informasi Sumber Daya Air)	Risda (Ruang Informasi Sumber Daya Air) merupakan ruang digital media interaktif (softmedia) yang berisi kumpulan data digital content yang terdiri dari data movie, digital vector dan digital form. RISDA berfungsi sebagai sarana penyebaran informasi dan perolehan data aktual terkait sumber daya air. RISDA dapat diintegrasikan menjadi offline system dan online system.	Dinas PSDA

No	Inovasi	Deskripsi	Instansi
5	Sistem Pelayanan Ora Ngresula (SIPON)	SIPON memanfaatkan media sosial WhatsApp dimana prosesnya saat masyarakat datang ke kantor desa untuk mengurus persyaratan maka perangkat desa akan mengambil gambar persyaratan dokumen masyarakat, untuk selanjutnya gambar tersebut dikirim melalui WhatsApp ke petugas operator di kecamatan. Berdasarkan gambar yang dikirimkan operator di kecamatan melakukan pemeriksaan apakah persyaratan sudah lengkap atau belum, jika belum kekurangan persyaratan akan diinformasikan ke operator di desa. Jika sudah lengkap maka operator kecamatan akan memproses pengurusan dokumen dimaksud. Estimasi penyelesaian dokumen jika persyaratan sudah lengkap sekitar 10 – 30 menit. Sehingga nantinya saat masyarakat datang ke kecamatan hanya mengirimkan persyaratan dan mengambil dengan dokumen kependudukan yang sudah diproses tadi.	Kecamatan Kampung Laut
6	SICANTIK (Inovasi Cilacap Tanpa Kantong Plastik)	gerakan pengurangan penggunaan kantong plastik dengan cara : manimalisasi penggunaaann kantong plastik sekali pakai, mengganti kantong plastik dengan tas guna ulang / goodie bag.	Dinas Lingkungan Hidup
7	KELORISASI (Gerakan Menanam dan Mengolah Tanaman Kelor Untuk Mencegah Stunting di Kecamatan Sidareja)	KELORISASI (Gerakan Menanam dan Mengolah Tanaman Kelor Untuk Mencegah Stunting di Kecamatan Sidareja)	Kecamatan Sidareja
8	Forum Seller and Buyer Sebagai Upaya Meningkatkan Kunjungan Wisata Ke Desa Wisata di Kabupaten Cilacap	Forum Seller and Buyer adalah suatu inovasi mempertemukan antara desa wisata dengan biro perjalanan, pemandu wisata, pengelola daya tarik wisata, perhotelan, pusat oleh-oleh dan kuliner, usaha UMKM dan pelaku ekonomi kreatif sehingga terjalin koneksi untuk saling mempromosikan kegiatan pariwisata di Kabupaten Cilacap dan sekitarnya.	Disporapar

No	Inovasi	Deskripsi	Instansi
9	Aplikasi SIKEBUD: Ensiklopedia Kebudayaan Cilacap	Merupakan katalog virtual yang menampilkan berbagai objek kebudayaan meliputi kesenian, cagar budaya, upacara adat, dan makanan tradisional yang ada di Kabupaten Cilacap. Aplikasi ini diharapkan dapat menambah pengetahuan masyarakat tentang potensi kebudayaan di Kabupaten Cilacap dan menjadi media pembelajaran seni budaya pada instansi pendidikan.	Dinas P dan K
10	CIBLON (Cilacap Belanja Online)	Merupakan aplikasi promosi dan penjualan secara online.	DPKUKM
11	CEMANI ANGKER (Cetak Mandiri Angkatan Kerja 1 - AK1)	Inovasi yang diciptakan untuk memaksimalkan pelayanan AK1 dengan menyediakan fasilitas cetak mandiri untuk para pencari kerja	Disnakerin
12	Inspektorat Cilacap Mobile	Aplikasi mobile untuk monitoring temuan, konsultasi dan informasi serta memberikan laporan kepada Inspektorat Kabupaten Cilacap	Inspektorat
13	Peta Rambu lalu lintas Menggunakan Google MyMaps	Peta Rambu Lalu Lintas Menggunakan Google MyMaps merupakan salah satu upaya penyediaan sistem informasi terkait rambu lalu lintas berbasis geospasial. Hal ini perlu untuk dilakukan di era digital ini guna memudahkan aksesibilitas pengguna informasi, mengumpulkan hasil inventarisasi data rambu lalu lintas, serta data pengamatan dan pemantauan terhadap keberadaan dan kinerja rambu lalu lintas. Peta Rambu Lalu Lintas Menggunakan Google MyMaps menyediakan database lokasi, jenis rambu, dan kondisi rambu lalu lintas yang sudah terpasang untuk memudahkan Dinas Perhubungan dalam melakukan pemeliharaan rambu lalu lintas, serta menyediakan database kebutuhan pemasangan rambu lalu lintas untuk memudahkan Dinas Perhubungan dalam melakukan pengadaan / penyediaan rambu lalu lintas baru. Dengan demikian, akan meningkatkan kinerja penyediaan perlengkapan jalan sebagai bagian	Dinas Perhubungan

No	Inovasi	Deskripsi	Instansi
		untuk mendukung RUNK LLAJ menuju Indonesia Zero Accident.	
14	SMART PBB	Sistem informasi pengelolaan pajak bumi dan bangunan (PBB)	BPPKAD
15	MARI PERCAYA (Manajemen Informasi Pusat Kesejahteraan Sosial Cilacap Bercahaya)	Merupakan program layanan rujukan satu pintu (terintegrasi) atau Single Windows Service (SWS) dan bertujuan untuk memudahkan masyarakat menerima layanan sesuai dengan kebutuhannya secara mudah, murah, cepat, dan tepat. Dalam pelaksanaannya, Pusat Kesejahteraan Sosial – Sistem Layanan Rujukan Terpadu (Puskesos –SLRT) Cilacap Bercahaya didukung oleh aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Cilacap Bercahaya (SIKS-CB) yang akan digunakan sebagai big data dalam penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Cilacap agar tepat sasaran.	Dinas Sosial
16	BIMAKU DESA (Buku Instrumen Monitoring Administrasi Dan Keuangan Desa)	BIMAKU DESA adalah buku elektronik yang berisi Panduan Instrumen Monitoring Administrasi dan Keuangan Desa dalam rangka meningkatkan tertib administrasi dan akuntabilitas administrasi dan Keuangan Desa-desa di Kecamatan Majenang	Kecamatan Majenang
17	SITI MAKNYUS (Sistem Manajemen Kombinasi untuk Pelayanan Mudah dan Bagus)	Menghimpun semua jenis pelayanan pada masyarakat di Kecamatan Cilacap Utara sehingga memiliki kecepatan dan ketepatan sesuai dengan yang dibutuhkan masyarakat	Kecamatan Cilacap Utara
18	GUNTING BAJAK SUTRA (Pemberdayaan Perguruan Tinggi Dalam Penyediaan Bahan Kajian Kebijakan Penangan Isu Strategis Daerah)	untuk mendukung perencanaan pembangunan yang berbasis riset (Research Based Planning) dengan menyinkronkan kebutuhan riset OPD dengan Riset yang dilakukan Oleh Perguruan Tinggi untuk membantu mengani isu strategis daerah	Bappeda
19	Fast For Investment By SIMPATIC (Sistem Informasi Manajemen Potensi dan Peluang Investasi Cilacap)	Aplikasi Sistem Informasi Penanaman Modal Cilacap (SIMPATIC) adalah aplikasi yang memuat potensi-potensi investasi yang ada di Kabupaten Cilacap melalui website. Aplikasi ini berfungsi untuk mempromosikan dan	DPMPSTP

No	Inovasi	Deskripsi	Instansi
		mempermudah para investor untuk melihat potensi-potensi investasi yang ada di Kabupaten Cilacap	
20	MAS SEBAKUL (Maos Bersinergi Untuk Pemberdayaan Ekonomi Kreatif Melalui UMKM Lokal)	Merupakan inovasi yang mensinergikan seluruh stakeholder kecamatan Pemberdayaan Ekonomi Kreatif Melalui UMKM Lokal	Kecamatan Maos
21	PENDAPAT (Pesan Datang Dapat)	Memberikan kemudahan dan kecepatan waktu, kepastian layanan khusus bagi pemohon Perijinan SIUP tertentu, IUMK dan Pemohon kepesertaan listrik bersubsidi.	Kecamatan Kawunganten
22	Program Beras PNS	Program ini dimaksudkan agar beras yang dihasilkan oleh para petani/kelompok tani/gapoktan yang ada di Kabupaten Cilacap dapat dibeli dan dinikmati oleh masyarakat Cilacap. Pembelian beras Cilacap oleh aparat/PNS Cilacap merupakan bentuk semangat ikut membangun daerah. Sampai saat ini peogram beras PNS telah berjalan dengan baik dengan rata-rata suplai beras untuk PNS mencapai 6 ton/bulan.	Dispabun
23	SIDAPEDES (Sistem Informasi Data Aparatur Pemerintah Desa)	Merupakan cara agar proses penganggaran bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa berupa Alokasi Dana Desa sebagai salah satu unsur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat tersusun dengan baik tepat jumlah ataupun tepat waktu maka perlu adanya sebuah Sistem Informasi Data Aparatur Pemerintah Desa di Kabupaten Cilacap.	Dispermades
24	SIREKSOBUDI (Pelayanan Surat Rekomendasi BBM Bersubsidi Dengan Sistem Rekomendasi Pembelian Solar Bersubsidi)	Pelayanan Surat Rekomendasi BBM Bersubsidi Dengan Sistem Rekomendasi Pembelian Solar Bersubsidi kepada nelayan	Dinas Perikanan
25	E-Dalev (Sistem Informasi Pelaporan Realisasi Rencana Kerja Perangkat Daerah)	E-Dalev adalah sebuah sistem informasi pelaporan realisasi rencana kerja (renja) berbasis laporan triwulan yang telah beroperasi sejak tahun 2022, monitoring pelaksanaan kinerja, program dan anggaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap.	Bappeda

Daftar Inovasi RSUD dan Puskesmas di Kabupaten Cilacap Tahun 2023

No	Inovasi	Deskripsi	Instansi
1.	Percepatan Penanganan Sindrom Koroner Akut Di Kabupaten Cilacap Dengan SINAR SENJA (Sharing Gambar EKG Serangan Jantung di Kabupaten Cilacap)	Merupakan inovasi Penanganan Sindrom Koroner Akut Di Kabupaten Cilacap Dengan SINAR SENJA (Sharing Gambar EKG Serangan) melalui pemantauan Sp.PJ dan penanganan langsung	RSUD Cilacap
2.	Program RENALIS (Ruang Edukasi Pasien Gagal Ginjal Kronis)	Merupakan inovasi Edukasi Pasien Gagal Ginjal Kronis di Kabupaten Cilacap	RSUD Cilacap
3.	GOTUBALL (Goyang Inpartu Dengan Gymball)	Inovasi Gotuball yaitu Goyang Inpartu dengan Gymball Merupakan inovasi untuk untuk mengurangi nyeri persalinan, mempercepat proses persalinan, mampu memberikan semangat pada ibu serta membuat ibu lebih nyaman dalam proses persalinan.	RSUD Cilacap
4.	Penghantaran Obat Aman Tanpa Antrian (HANOMAN)	Sebuah inovasi yang proaktif dan harus segera dilaksanakan tentang pengembangan distribusi obat pasien rawat jalan di Instalasi Farmasi RSUD Cilacap. dengan menggunakan metode hantaran obat aman tanpa antrian (HANOMAN) ke rumah pasien dengan bekerjasama dengan PT POS Indonesia.	RSUD Cilacap
5.	SIAP MATA (Sistem Informasi Antrian Pendaftaran, Tempat Tidur dan Aduan Masyarakat)	Inovasi pelayanan pendaftaran poli rawat jalan yang memfasilitasi pendaftaran online tanpa menghilangkan pendaftaran offline	RSUD Majenang
6.	ANTAR CARE DOK PEUDES (Antenatal Care Bidan Kolaborasi Dokter Plus USG)	Antenatal Care Bidan dengan berkolaborasi Dokter Plus USG untuk meminimalisir dampak AKI AKB	Puskesmas Majenang I
7.	SIPITALOKA (Sistem Pendaftaran Cepat Tiga Loker Antrian)	Pembagian loket antrian menjadi 3 loket antrian diharapkan dapat mempercepat pelayanan dikarenakan sudah ada prioritas dalam menentukan sasaran pasien yang akan dilayani terlebih dahulu karena terkait dengan jumlah pasien dan tingkat keparahan yang berbeda-beda.	Puskesmas Majenang I

No	Inovasi	Deskripsi	Instansi
8.	GAYENG NING ATI (Gerakan Layanan Skrinning, Aktif Temukan Hipertensi)	Inovasi Pelayanan Publik dalam rangka mendekatkan jangkauan akses skrinning usia produktif khususnya pelayanan hipertensi ke seluruh pelosok wilayah kerja dalam rangka meningkatkan cakupan pelayanan hipertensi demi terwujudnya derajat Kesehatan masyarakat setinggi tingginya, yang diberi nama GAYENG NING ATI (Gerakan Layanan Skrinning, Aktif Temukan Hipertensi).	Puskesmas Cimanggu II
9.	GIAT SELEBRITIS (Strategi Cepat Seleksi Batuk Terduga Tuberkulosis)	Dalam upaya peningkatan penemuan kasus tuberkulosis di wilayah kerja, UPTD Puskesmas Dayeuhluhur II berinovasi dalam kegiatan penapisan secara pasif, intensif, aktif, dan masif melalui Strategi Cepat Seleksi Batuk Terduga Tuberkulosis, atau "GIAT SELEBRITIS" yaitu kegiatan untuk mengidentifikasi dan memisahkan orang dengan keluhan / gejala TBC setelah melalui uji skrining dimasukkan dalam kriteria terduga TBC kemudian dilakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk menegakan diagnose, pengobatan, pemantauan dan evaluasi.	Puskesmas Dayeuhluhur II

Daftar Inovasi oleh BUMDes di Kabupaten Cilacap

No	Inovasi	Deskripsi	Instansi
1	Solusi Pemberdayaan Para Pemuda (SP3)	Upaya pemberdayaan pemuda Desa Pegadinga, Kecamatan Cipari untuk menciptakan kemandirian pemuda dan dapat berkarya untuk masa depan.	Desa Pegadingan, Kecamatan Cipari
2	BAPAK DESA (Bayar Pajak Dengan Sampah)	Inovasi diterapkan setiap tahun saat Pemerintah Desa melaksanakan penarikan Pajak Bumi dan Bangunan dengan cara menghimpun dana dari masyarakat yang berasal dari penjualan limbah rumah tangga berupa sampah anorganik (plastik, kardus/ kertas, kaca) yang dikelola oleh Pengurus Bank Sampah RT 14 RW 04 Desa Pucung Lor secara rutin dan berkesinambungan.	Desa Pucung Lor, Kecamatan Kroya

No	Inovasi	Deskripsi	Instansi
3	Aplikasi Pesen Bae	Pesen Bae merupakan karya anak bangsa yang berdiri pada tahun 2023 di Kroya. Aplikasi Pesen Bae ini kali pertama lahir dengan niat baik untuk memberikan solusi memudahkan pemasaran produk untuk kehidupan sehari-hari di tengah berkembangnya Kecamatan Kroya. Aplikasi Pesen Bae ini bekerja dengan menghubungkan pelaku UMKM dengan konsumen khususnya daerah Kroya, dimana sebelumnya konsumen menghabiskan waktu untuk mencari kebutuhan baik dibidang kuliner, produk kerajinan, makanan ringan/snack ataupun kebutuhan catering untuk acara/moment penting seperti khitanan, yasinan, pernikahan, maupun lainnya.	Desa Karangmangu, Kecamatan Kroya
4	E-Panulisan	Sebelum adanya e-Panulisan sistem pelayanan publik di Desa Panulisan masih dilakukan secara tatap muka. Kegiatan UMKM juga terbatas hanya dilakukan dengan menjual produknya secara offline dan target market yang ditetapkan juga cenderung terfokus diwilayah terdekat saja. Semua hal tersebut berubah ketika e-Panulisan mulai digunakan pada tahun 2021. Kegiatan pelayanan sudah bisa dilakukan secara online. Para pelaku UMKM juga memiliki branding yang bagus. Mereka mendapatkan desain logo, kemasan, katalog, dan iklan gratis untuk meningkatkan market awareness dari seluruh wilayah di Indonesia.	Desa Panulisan, Kecamatan Dayeuhluhur
5	Bayar Pajak Dengan Sampah	Merupakan inovasi membayar Pajak Bumi dan Bangunan dengan pemanfaatan sampah yang dapat meningkatkan hasil pendapatan daerah dari penerimaan PBB dengan cara meringankan warga dalam metode membayarnya.	Desa Karanggedang, Kecamatan Sidareja
6	Mewujudkan Lingkungan Yang Bersih dan Sehat Dengan MAMI SAMIRAH	pelaksanaan Inovasi ini adalah dengan melaksanakan pemilahan sampah langsung dari Rumah Tangga dapat menekan jumlah warga untuk	Kelurahan Tegalreja, Kecamatan

No	Inovasi	Deskripsi	Instansi
	(Maksa Milah Sampah Dari Rumah)	membuang sampah sembarangan, mengurangi volume sampah yang diangkut ke TPS sementara oleh petugas sampah, masyarakat bisa memperoleh tambahan penghasilan dengan adanya pemilahan sampah melalui system tabungan pada Bank Sampah serta tentunya mendukung lingkungan menjadi bersih dan sehat.	Cilacap Selatan
7	Pembuatan Tepung Yutuk Pada Kelompok Nelayan Yutuk Desa Widarapayung Wetan Cilacap	Inovasi Tepung yutuk dapat memperpanjang masa simpan produk, meningkatkan mutu, dan memudahkan pengolahan menjadi berbagai masakan dengan jangka waktu penyimpanan yang lebih lama.	Desa Widarapayung Wetan, Kecamatan Binangun
8	Perpustakaan Desa Ngudi Ilmu	Perpustakaan desa sebagai salah satu media pengembangan ilmu pengetahuan yang menjadi wadah aktivitas dan kreativitas anak dan remaja, sehingga mampu meningkatkan minat anak dan remaja dalam hal membaca dan mengembangkan diri.	Desa Rawaapu, Kecamatan Patimuan
9	Inovasi Pengolahan Makanan Berbahan Dasar Mangrove oleh Kelompok Gamiangrove RW 06	Inovasi pemanfaatan buah mangrove yang biasanya hanya digunakan untuk pembibitan mangrove setelah dari Kelompok mengikuti pelatihan-pelatihan dan inovasi tentang pengolahan berbahan dasar mangrove. Pengolahan mangrove dibuat menjadi beberapa jenis makanan. Makanan yang dibuat oleh Kelompok Gimangrove : Kue Kering, Keripik, Cendol, Tepung Mangrove dan dodol Mangrove.	Kelurahan Karangtalun, Kecamatan Cilacap Utara
10	Keripik Pisang Lumer	Pembuatan Keripik Pisang Lumer sebagai salah satu Produk Unggulan Desa yang diprakarsai oleh KWT Maju Jaya Pahonjean.	Desa Pahonjean, Kecamatan Majenang
11	GAGIYAN PEPEK (Gebyar Pengundian Hadiah PBB-P2) Sebagai Strategi Meningkatkan Kesadaran Wajib Pajak Untuk Pelunasan PBB-P2 Lebih Awal	GAGIYAN PEPEK (Gebyar Undian Hadiah PBB-P2) Desa Jenang sebagai strategi meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk pelunasan PBB-P2 lebih awal menasar 5.817 Wajib Pajak di Desa Jenang agar semakin terpacu untuk membayar pajak lebih awal.	Desa Jenang, Kecamatan Majenang

No	Inovasi	Deskripsi	Instansi
12	Sadabumi Zero Organic Waste, Free Fertilizer Dalam Perang Terhadap Stunting dan Kemiskinan	Inovasi Sadabumi Zero Organic Waste, Free Fertilizer bertujuan menurunkan angka kemiskinan dengan cara meningkatkan pendapatan para peternak, petani, pelaku usaha dan meningkatkan lapangan pekerjaan di wilayah Desa Sadabumi, Kecamatan Majenang.	Desa Sadabumi, Kecamatan Majenang
13	Kawasan Wisata Pertanian Desa Mernek	Rice cycle yaitu sebuah mekanisme siklus penyeragaman budidaya padi dari persiapan lahan sampai dengan pengeringan yang berasal dari demonstration plot Kawasan Wisata Pertanian (KAWISTA) pertama di Kabupaten Cilacap. Inovasi ini diimplementasikan di Desa Mernek, Kecamatan Maos, Kabupaten Cilacap dan menjadi area one stop agriculture education. Inovasi sosial yang dilaksanakan untuk program Kawista secara umum belum pernah diterapkan sebelumnya di wilayah manapun, yaitu mengintegrasikan antara demplot (demonstration plot) pertanian, wisata pertanian, usaha pertanian yang dikelola oleh gapoktan dan BUMDes serta pusat kegiatan masyarakat termasuk didalamnya UMKM.	Desa Mernek, Kecamatan Maos
14	Glempang Mandiri Internet "INDES" Usaha Internet Desa Oleh BUMDES Umbul Harjo	Program GLEMPANG MANDIRI INTERNET ini INDES sebagai unit usaha bisnis BUMDES UMBULHARJO sudah ikut serta mensukseskan program pemerintah tersebut dengan menggali sumber daya manusia yang ada di desa.	Desa Glempang, Kecamatan Maos

Cilacap, 28 Maret 2024

Pj. BUPATI CILACAP


AWALUDDIN MUURI